

Tabel. IV.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Tata Pemerintahan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi hubungan antar strata pemerintahan	1.1 Meningkatkan tertib penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	1. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan sosialisasi dan Pembinaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
			2. Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan diberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan penyusunan kode & data wilayah administrasi pemerintahan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
		1.2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
			2. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
			3. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
			4. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
		1.3 Meningkatkan tertib administrasi bidang pertanahan dan koordinasi	1. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi data masalah - masalah unsur	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota

		pelaksanaan trantib	pertanahan & pelaksanaan pengadaan tanah						
			2. Jumlah Kab/Kota yang kondisi sosial, hukum, dan keamanannya kondu sif dalam -	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan						
		1.4	<i>Meningkatnya tertib administrasi penataan wilayah.</i>	1. Jumlah Kab/Kota yang teridentifikasi data toponimi, terpeliharanya pilar batas.	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
				2. Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi permasalahan segmen batas wilayah.	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	<i>Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama</i>	2.1	Meningkatnya pelaksanaan percepatan penerapan standar pelayanan minimal	1. Jumlah pembinaan, dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan/NSPK		35	35	35	35	35
				2. Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan SPM Prov dan Kab/Kota		35	35	35	35	35
				3. Jumlah Peserta Peserta Rakor persiapan penyusunan Laporan Capaian SPM Prov dan Kab/Kota		110	120	120	120	120
				4. Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan KDH tentang Urusan Pemerintahan/SPM			1			
				5. Jumlah Peserta Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan dan SPM		70	100	140	140	140
		2.2	Meningkatnya kualitas LKPPD Provinsi Jawa Tengah dan kualitas EKPPD Kabupaten/ Kota dan pelaporan pemerintahan daerah	1. Jumlah Buku LPPD yang tersusun	80	80	80	80	80	80
				2. Jumlah ILPPD yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa regional	1	1	1	1	1	1
				3. Jumlah kab/kota yang terdampingi dan terbina dalam penyusunan LPPD kab/kota	35	35	35	35	35	35
				4. Jumlah peserta bintek tata cara penyusunan LPPD	90	90	90	90	90	90

				dan ILPPD yang terlaksana						
				5.Jumlah data LPPD Prov Jateng yang telah diverifikasi oleh tim pusat	2	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			6. Jumlah Kab/Kota yang telah diverifikasi oleh Tim Prov		11	11	11	11	11	
			7. Jumlah Kab/Kota yang termonitor dan terevaluasi luasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	35	35	35	35	35	35	
		2.3	Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah	1. Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari jadi Prov. Jateng di 35 kab/kota dan Prov. Jateng	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Otonomi Daerah	1	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemetaan kapasitas daerah	1						
			3. Jumlah Sosialisasi pengembangan kapasitas daerah			35	35	35	35	
			4. Jumlah Penyusunan pergub pengembangan kapasitas daerah di 35 kab/kot		1					
			5. Jumlah sosialisasi pergub pengembangan kapasitas		1					
			6. Monitoring Kab/Kota	35	35	35	35	35	35	
		2.4	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah	1. Jumlah penyelenggaraan pemilukada 35 kab/kota yang difasilitasi		4	17	7	5	7
			2. Jumlah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah 35 kab/ kota yang difasilitasi		4	17	7	5	4	
			3. Jumlah penanganan masalah pilkada di 35 kab/kota yang difasilitasi		3	5	2	2	1	

		2.5	Meningkatnya tertib administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota	1. Jumlah proses PAW DPRD Kab/Kota yang difasilitasi. 2. Jumlah proses PAW DPRD Prov yang difasilitasi		8 5	70 2	30 5	40 7	60 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
		2.6	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah baik dalam negeri maupun luar negeri	1. Jumlah draft/dokumen kerjasama. 2. Jumlah Rakor 3. Jumlah draft/dokumen kerjasama 4. Jumlah Rakor 5. Jumlah draft Pergub yang tersusun 6. Tindak lanjut kerjasama luar negeri 7. Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri 8. Jumlah penerimaan delegasi luar negeri (85 negara). 9. Jumlah pengajuan permohonan ijin untuk ke luar negeri (120 rekomendasi). 10. Jumlah pedoman pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri yang tersusun 11. Penyelenggaraan sosialisasi tata cara kerjasama pemda dengan luar negeri 12. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dg luar negeri 13. Jumlah		10 1 6 2 3	10 1 6 2 3	10 1 6 2 3	10 1 6 2 3	10 1 6 2 3	10 1 6 2 3

				Kab/Kota yg dilakukan monitoring & evaluasi tenaga magang luar negeri						
				14. Jumlah forum Sister province/city		2	3	3	3	3
				15. Jumlah rintisan kerjasama Sister province/city dengan daerah di luar negeri			1	1	1	1
				16. Jumlah Studi banding pelaksanaan kerjasama luar negeri					1	
				17. Jumlah Pertukaran SDM dg negara mitra sister province			1	1	1	1

Sumber : Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	3.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.	1 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji	6	6	7	7	8	8
			2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tersusun	6	7	7	8	8	8
			3 Jumlah Peraturan Perundangan Daerah Yang disusun	17 Perda a	18 Perda a	20 Perda a	22 Perda a	24 Perda a	26 Perda
			4 Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur yang tersinkronisasi dan diharmonisasi	0	5	10	10	12	12
			5 Jumlah Raperda kab/ kota yang dievaluasi	75	50	50	50	50	50
			6 Jumlah Perda/ Perkada kab/kota yang diklarifikasi	100	125	130	135	140	145
		3.2 Meningkatkan pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum.	1 Jumlah Lomba kadarkum ormas tingkat Provinsi Jawa Tengah.	4	4	4	4	4	4
			2 Jumlah Perda Provinsi Jawa Tengah yang disosialisasikan.	2	1	1	1	1	1
		3.3 Meningkatkan sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum.	1 Jumlah Penambahan koleksi dokumen tasi hukum.	75	45	85	90	100	130
			2 Jumlah data pada pangkalan data peraturan perundang-undangan.	50	40	65	70	75	80
		3.4 Meningkatkan pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin	1 Jumlah LBH yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan	25	20	23	25	25	27

		kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	bantuan hukum						
			2 Jumlah perkara masyarakat tidak mampu yang ditangani	250	150	170	200	220	250
			3 Jumlah penanganan perkara perdata	4	4	6	6	6	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah						
			4 Jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dengan Pemerintahan Daerah	0	10	15	15	20	20
		3.5 Meningkatnya penyelesaian sengketa hukum	Jumlah Aset yang diupayakan penyelesaian permasalahannya	3	3	3	3	3	3
		3.6 Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM).	1 Jumlah penanganan aduan masyarakat yang terkait dugaan pelanggaran HAM.	10	10	15	20	20	25
			2 Rakor Pokja RANHAM Prov. Jateng.	2	2	2	2	2	2
			3 Rakor Fasilitasi Laporan RAN HAM Kab/Kota.	3	3	3	3	3	3
		3.7 Meningkatnya <i>good governance</i> melalui pemerintahan yang bebas korupsi	1 Jumlah Kab/ Kota yang di fasilitasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	16	20	25	30	35
			2 Jumlah rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun	3	35	35	35	35	35

				2 Implementasi Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK)	Prov. Kab. Pema lang, Kota Smg	Prov. & 35 Kab/ Kota	Prov. & 35 Kab/ Kota	Prov. & 35 Kab/ Kota	Prov. & 35 Kab/ Kota	Prov. & 35 Kab/ Kota
--	--	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Sumber : Biro Hukum Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Adm. Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	<i>Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah</i>	4.1	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jawa Tengah	80	250	275	300	325	350
				2. % SKPD dalam pelaksanaan APBD yang capaian realisasi fisik sesuai target RKO	65	70	75	80	85	90
				3. % SKPD dan kab/kota dalam pelaksanaan Sistem Monitoring TEPPA secara optimal	-	65	70	75	80	85
		4.2	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan kab/kota	1. % progres penyelesaian kegiatan yang dibiayai melalui bantuan keuangan pada kab/kota	90	92	93	94	95	95
				2. Jumlah kegiatan yang difasilitasi untuk Peningkatan Prestasi Jateng di Tk. Nasional	15	13	13	14	15	15
				3. % usulan program pembangunan infrastruktur yang difasilitasi	80	85	87	90	92	95
		4.3	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	1. % SKPD yang pelaporan pelaksanaan APBD tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%	90%
				2. % kab/kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%	90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3. Jumlah set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng	400	400	400	400	400	400
			4. % efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima	80	82	84	86	88	90
			5. % kesesuaian SKPD dalam entry data melalui SIMBANGDA	70	75	80	85	90	92
			6. % kesesuaian SKPD kab/kota dalam entry data bantuan keuangan melalui SIMBANGDA	65	70	75	80	85	90

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Perekonomian

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	<i>Mewujudkan Struktur Perekonomian Daerah yang Stabil dan Mantap</i>	5.1	Meningkatnya sinergitas kebijakan dan pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi & UMKM, Pemberdayaa Ekonomi Desa, dan Bidang Perindustrian dan Peragangan	19	19	38	57	76	95
		5.2	Meningkatnya siner gitas dalam pelak sanaan promosi pembangunan, pari wisata dan opti malisasi dalam me wujudkan infra struktur dan perhu bungan di daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Bid. Perhubungan, Kerjasama Penanaman Modal, Pariwisata, dan Bidang Promosi	10	10	20	30	40	50
		5.3	Meningkatnya siner gitas kebijakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD	Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMD, dan dok ATK serta Rapat-rapat luar dan dalam.	23	23	26	39	52	65

dSumber : Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Produksi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	<i>Meningkatkan produktivitas daerah</i>	6.1	Meningkatnya sinergitas dalam pe-nyusunan kebijakan dan pe-laksanaan pembangunan bidang pertanian	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengembangan agrobisnis pertanian dan Promosi Pembangunan Pertanian	26	29	26	26	26	29
				2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas perikanan	9	9	10	10	11	11
		6.2	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pembangunan kehutanan dan pelestarian sumber daya hutan	7	11	11	14	14	14
				2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan, pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup	7	11	11	13	13	13
		6.3	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan migas dan energi baru terbarukan dan pelaksanaan penghematan energi	3	5	5	5	5	5
				2. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pe-nanganan permasalahan pe-ngelolaan lingkungan dan pe-layanan publik	2	4	5	5	5	5

				sumberdaya air dan pertambangan						
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Biro Bina Produksi Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Bina Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	<i>Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat</i>	7.1	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana	1. Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dengan kesejah teraan sosial dan penang gulangan bencana (trakor)	9	13	12	12	12	12
			2. Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor /perlu dilaku kan koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)	35	35	35	35	35	35	
		7.2	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	1. Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (trakor)	12	14	14	15	15	15
				2. Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)	3	3	3	3	3	3
				3. Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / dikoordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kab/kota)	35	35	35	35	35	35
				4. Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)	16	14	17	19	22	23
				5. Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)	3	2	3	2	3	3
				6. Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum	-	9	9	9	9	9

				pkja)						
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7.3	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan penanggulangan kemiskinan	1. Jumlah rapat koordinasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)	14	16	16	18	18	18
				2. Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)	35	35	35	35	35	35
				3. Jumlah koordinasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)	8	9	9	10	10	10
				4. Jumlah koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan	4	5	5	5	5	5

				kemiskinan (kali)						
				5. Prosentase Kemiskinan	Angka 14,4 4	11,5 8- 11,3 7	9,05 -8,75	8,60- 8,35	8,25- 8,00	7,80 - 7,60

Sumber : Biro Bina Sosial Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Bina Mental

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	<i>Mewujudkan optimalnya pembinaan mental masyarakat</i>	8.1	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian	1. Jumlah fasilitasi bidang keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah	5	5	5	5	5	5
				2. Jumlah fasilitasi Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng	3	2	2	2	2	2
		8.2	Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Jumlah fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Jateng	1	1	1	1	1	1
				2. Jumlah fasilitasi Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olahraga di Jateng	2	3	3	3	3	3

Sumber : Biro Bina Mental Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Organisasi Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	<i>Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat daerah yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah</i>	9.1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	1. % SKPD yang efektif dan efisien kelembagaanya	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			2. % kab./kota yang kelembagaanya sesuai regulasi	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			3. Prosentase SKPD yang Implementasi Anjabnya baik	65%	70%	75%	80%	85%	90%
		9.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	1. % SKPD yang SAKIP nya baik	40%	50%	60%	70%	80%	90%
			2. % SKPD yang budaya kerjanya baik	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			3. Indonesia Governance Index	5.90	5.92	5.94	5.96	5.98	6.00
		9.3 Meningkatkan efektifitas dan efiseinsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1. % SKPD yang pelaksanaan ketatalaksannya baik	25%	30%	45%	50%	55%	60%
			2. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	9 SKP D/U PT	11 SKPD /UPT	13 SKP D/U PT	15 SKP D/U PT	17 SKP D/U PT	19 SKP D/U PT
			3. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO	19 UPP	21 UPP	23 UPP	25 UPP	27 UPP	29 UPP
			4. Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%
		9.4 Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda	1. Pemenuhan pelayanan administrasi PNS di lingkungan Setda Prov.Jateng	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.11
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Keuangan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	<i>Mewujudkan efek tiftas efisiensi dan tertib adminis trasi pengelolaan keuangan daerah</i>	10.1 Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif , efisien dan akuntabel	1. Jumlah Perda dan Pergub APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban APBD yang tersusun	48	48	48	48	48	48	
			2. Jumlah Pedoman Penatausahaan Pelaksa naan APBD yang tersusun	48	48	48	48	48	48	
			3. Jumlah laporan triwulan dan semes teran pelaksanaan AP BD dan neraca SKPD sebagai neraca Pemda yang tersusun	48	48	48	48	48	48	
			4. Jumlah Kab /Kota yang di Evaluasi Raperda APBD, Per- tanggungjawaban dan Perub APBD	35	35	35	35	35	35	
			5. Jumlah pelaksanaan Manaj di Kasda	48	48	48	48	48	48	
			6. Opini BPK WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		10.2 Meningkatnya tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel	Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan anggaran dan bantuan	48 SKPD dan 35 Kab/ Kota	48 SKP D dan 35 Kab/ Kota	48 SKP D dan 35 Kab/ Kota	48 SKP D dan 35 Kab/ Kota	48 SKP D dan 35 Kab/ Kota	48 SKP D dan 35 Kab/ Kota	48 SKPD dan 35 Kab/ Kota
		10.3 Meningkatnya tertib administrasi dan efektifitas sistem pengelolaan kas daerah	Jumlah RSUD dan RSJD yang difasilitasi pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah	7 RSUD dan RSJD	7 RSUD dan RSJD	7 RSUD dan RSJD	7 RSUD dan RSJD	7 RSUD dan RSJD	7 RSUD dan RSJD	
		10.4 Meningkatnya tertib dan efektifitas sistem pengelolaan								

		akuntansi keuangan daerah							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.12
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Kehumasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	<i>Mewujudkan optimalisasi publikasi dan kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat</i>	11.1 Meningkatkan efektivitas publikasi pelaksanaan dan hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	1. Jumlah cakupan pembuatan sambutan/ makalah/keynote speech/materi(paparan/mengajar) yang dihasilkan	1080	360	360	360	360	360
			2. Jumlah cakupan liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah	570	570	570	570	570	570
			3. Jumlah kebijakan dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang di publikasikan melalui media cetak						
			4. Jumlah Blow Up di Media cetak	10	10	10	10	10	10
			5. Jumlah Dialog Interaktif	100	128	128	128	144	144
			Jumlah Rubrik	240	240	240	240	240	240
		11.2 Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal	1. Jumlah data dan informasi pembangunan Jawa Tengah yang di publikasikan kepada masyarakat	36	36	36	36	36	36
			2. Jumlah pengelola sistem informasi yang ditingkatkan kompetensinya	59	59	59	59	59	59
		11.3 Meningkatkan kualitas analisis media dan informasi dalam	1. Jumlah pendapat umum masyarakat yang di carikan solusi penyelesaian masalahnya	3	3	4	4	6	6

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		rangka menciptakan pemberitaan yang obyektif dan berimbang serta bertanggung jawab	2. Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari hasil analisis berita media terkini	3	3	3	3	3	3
			3. Jumlah penambahan koleksi buku- buku bacaan	179	148	160	160	160	160

Sumber : Biro Humas Setda Prov.Jateng

Tabel. 4.13
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Bidang Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Mengoptimalkan kualitas pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan melalui pemberian dukungan rumah tangga, perlengkapan kesekretariatan dan keprotokolan.	12.1 Meningkatnya kualitas pelayanan bidang rumah tangga cepat dan bertanggung jawab	1. Prosentase Jasa telepon, sumber daya air, listrik gedung kantor maupun rumah dinas/jabatan yang dapat terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			2. Prosentase pemenuhan kegiatan sewa sarana mobilitas, sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda, sewa peralatan elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			3. Prosentase kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor dan rumah dinas /jabatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			4. Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK di lingkungan Biro Umum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			5. Prosentase pemenuhan kebutuhan cetakan di lingkungan Setda Prov.Jateng	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			6. Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			7. Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga di lingkungan kantor dan rumah dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			8. Prosentase pemenuhan kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

			penyediaan makanan dan minuman						
			9. Prosentase peningkatan prestasi bidang olahraga dan seni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			10.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			10. Prosentase peningkatan derajat kesehatan PNS dan anggota keluarganya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			11. Prosentase kondisi rumah jabatan dan lingkungannya menjadi lebih baik dan asri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			12. Prosentase kondisi rumah dinas dan lingkungannya menjadi lebih baik dan asri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			13. Prosentase kondisi gedung dan lingkungannya menjadi lebih baik dan asri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			14. Prosentase kondisi mobil jabatan siap untuk operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			15. Prosentase kondisi kendaraan dinas siap untuk operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			16. Prosentase kondisi perlengkapan gedung dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			17. Prosentase kondisi meubelair dalam menjadi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			18. Prosentase kondisi peralatan gedung dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

			rumah tangga menjadi baik dan siap kerja						
			19.Prosentase kondisi alat kedokteran dan laboratorium dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			20.Prosentase kondisi peralatan kesenian dan pendukungnya menjadi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			21.Prosentase kondisi rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nyaman dan representatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			22.Prosentase kondisi rumah dinas Provinsi Jawa Tengah yang representatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			23.Prosentase kondisi gedung kantor Prov.Jateng nyaman dan representatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			24.Prosentase kondisi perlengkapan sarana dan prasarana gedung provinsi Jawa Tengah yang representatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		12.2 Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas	1. Prosentase pangadaan pakaian dinas bagi karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Setda Prov.Jateng	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			2. Prosentase peningkatan pengelolaan aset di lingkungan setda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			3. Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan setda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			4. Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		12.3 Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan sandi dan	1. Cakupan layanan surat menyurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			2. Capaian pelayanan kesehatan KDH/WKDH dan PNS Setda Prov.Jateng	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

		telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda	3. Capaian biaya perjalanan dinas pimpinan dan pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			4. Cakupan pelayanan perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			5. Prosentase perawatan arsip dinas Setda prov.Jateng	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			6. Prosentase peningkatan kualitas dan profesional pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			7. Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		12.4 Meningkatkan, menyiapkan dan mengatur kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan kegiatan acara protokoler dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber : Biro Umum Setda Prov.Jateng